

PENCATATAN AKUNTANSI YANG ADA DI DALAM BUKU TEKS AKUNTANSI SAAT INI

Ignatius Bondan Suratno¹⁾, Bambang Purnomo²⁾, Benedicta Budiningsih³⁾

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
email: bondan@usd.ac.id

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
email: bambangpur@usd.ac.id

³Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Maria Yogyakarta
email: ning@asmistmaria.ac.id

Abstract

This study aims to describe the circumstances of the accounting record that already exists in the current accounting textbooks, benefit from accounting recording for the preparation of annual reports and taxes, and the recording of the more easily understood for students. This research is a descriptive study conducted at Sanata Dharma University in June-August 2017. The findings in this study is that accounting records that already exist in accounting textbooks are currently located in a condition where the recording of accounting cases as presented in the questionnaire is done when the parties involved make the record as a Taxpayer Agency that does not implement tax obligations, or not as an Individual Taxpayer, and or not as a taxable employers with an average score of 75%. Accounting records that provide more benefit for the preparation of annual reports and taxes are in a condition where the recording of accounting cases as presented in the questionnaire is done when the parties involved make the record as a Taxpayer Agency that perform taxation obligations, as an Individual Taxpayer, and as a Taxable Entrepreneur with an average score of 83%, the recording of the more easily understood for students when studying accounting materials integrated with tax instruments with an average score of 73%.

Keywords: *accounting, taxes, textbooks*

1. PENDAHULUAN

Berbagai buku teks akuntansi, seperti buku Akuntansi Pengantar (Suwardjono, 2003), Dasar-Dasar Akuntansi (Jusuf, 2011), Akuntansi (Horngren & Harrison, 2007), Akuntansi Intermediate (Kieso, dkk., 2002) maupun Akuntansi Keuangan Menengah (Giri, 2012), berisi materi yang menjelaskan proses akuntansi mulai dari pembuatan bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan berbagai penerapan prinsip akuntansi lainnya.

Belajar akuntansi yang ideal adalah belajar secara terintegrasi antara belajar materi akuntansi sebagai proses pengolahan informasi dan belajar perpajakan sebagai proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembelajaran dengan cara yang terintegrasi ini akan lebih memudahkan bagi mahasiswa dalam memahami konsep dan aplikasi dari proses akuntansi dan perpajakan yang dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan.

Belajar akuntansi dan perpajakan semestinya juga didasarkan pada masalah-masalah kontekstual sesuai dengan realitas di dunia bisnis (*problem based learning*). Dengan pembelajaran yang bersifat pemecahan masalah kontekstual ini mahasiswa akan mendapat pengalaman yang lebih bermakna. Dengan belajar berdasarkan penemuan masalah ini, peserta didik didorong untuk belajar lebih aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip (Suprijono, 2013:70). Ketika mahasiswa belajar akuntansi dan perpajakan, mereka juga belajar konsep dan prinsip, belajar menerapkan konsep dan prinsip tersebut, kemudian juga belajar mengevaluasinya.

Di era perdagangan bebas dimana persaingan sumberdaya manusia dari dalam dan luar negeri semakin ketat, buku teks akuntansi yang memasukkan unsur pajak ini mendesak dibutuhkan oleh mahasiswa karena dapat membantu mahasiswa memahami proses akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih komprehensif. Kewajiban perpajakan tersebut dapat berupa Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, 22, 23, 25, 29, Pajak Pertambahan Nilai dan (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sejalan dengan Kerangka Kerja Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) bahwa lulusan S1 bukan lagi sebagai teknisi dan analis, melainkan harus ahli dalam bidangnya, maka pembelajaran akuntansi dan perpajakan semestinya dirancang secara terintegrasi sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan sebagai tenaga ahli (Perpres No 8 Tahun 2012 Pasal 2). Proses pembelajaran akuntansi dan perpajakan di berbagai perguruan tinggi pun belum dilakukan secara terintegrasi dan buku teks yang tersedia pun disajikan terpisah antara materi akuntansi dan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah *bagaimana kondisi pencatatan akuntansi yang sudah ada di dalam buku-buku teks akuntansi saat ini, manfaat pencatatan untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak, dan pencatatan yang lebih mudah dipahami mahasiswa?*

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi

Menurut Horngren dan Harrison (2007:4), akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Sejalan dengan definisi itu, Al. Haryono Jusuf (2005:10) juga mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut H.Lili M. Sadeli (2014: 5-7), akuntansi dapat dikelompokkan menjadi bermacam-macam bidang:

- a. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*), yaitu menyajikan informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan, pemilik, kreditur, pemerintah, dan masyarakat.
- b. Auditing, bidang aktivitasnya menyangkut pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas.
- c. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*), yang bertujuan menyajikan informasi pengambilan keputusan yang relevan kepada manajemen perusahaan (pihak interen).
- d. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*), yang menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi suatu barang.
- e. Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*), yang menyajikan rencana operasi keuangan untuk periode tertentu, melalui pencatatan dan meringkas data pelaksanaan operasi dan memberikan analisis data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga merupakan kombinasi kegiatan perencanaan dengan pengendalian operasi masa depan.
- f. Sistem Akuntansi (*Accounting System*), yang merupakan bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan.
- g. Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*), yang meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT), serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik.
- h. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*), yang mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit

lainnya, seperti: masjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit dan lembaga-lembaga pendidikan.

- i. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*), yang tugasnya menyangkut masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
- j. Akuntansi Internasional (*International Accounting*), yang menyangkut masalah khusus yang berkaitan dengan perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional.
- k. Akuntansi Pendidik (*Educational Accounting*), yang merupakan bidang khusus yang menyangkut pendidikan akuntansi, namun kadang-kadang juga mengadakan penelitian, pemeriksaan akuntansi, atau terlihat dalam pengerjaan akuntansi perpajakan atau bidang akuntansi lainnya sebagai tenaga lepas (*part time*) atau sebagai penasihat (konsultan).

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Abut, 2010:2), pajak adalah *iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum*. Hasil pembayaran pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara dalam melayani melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Dari kacamata wajib pajak, pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi yang membawa konsekuensi tertentu. Dengan *system self assesment*, wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013: 7). Dengan kata lain, wajib pajak diberi kewenangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, memotong/memungut, membayar dan melaporkan. Wajib pajak tersebut mempunyai kewajiban perpajakan pada setiap bulan dan setiap tahunnya, bahkan kewajiban setiap ada kejadian yang berkaitan dengan keuangan. Laporan wajib pajak disusun berdasarkan catatan pada transaksi keuangan yang ada, maka kegiatan akuntansi tidak pernah terlepas dari kegiatan wajib pajak.

Dengan memperhatikan syarat pembukuan yang tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Perpajakan No 28 tahun 2007, secara implisit pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Aturan yang ada dalam prinsip akuntansi kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang, oleh karena itu jika ada pertentangan antara Undang-Undang Perpajakan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Disamping itu masih banyak aturan-aturan pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang berdampak dalam penyusunan laporan keuangan.

Buku Teks

Buku didefinisikan sebagai kumpulan kertas yang dijilid (Sitepu, 2012:12). Dahulu kala, buku tidak saja kumpulan kertas, tetapi juga bisa lembaran papyrus, lontar, dan perkamen yang tidak dalam bentuk dijilid. Dengan kemajuan teknologi saat ini, isi buku dapat ditampilkan dengan menggunakan peralatan elektronik dengan tata letak dan pewajahan yang sama dengan buku (buku elektronik). Sitepu (2012:17) mengelompokkan buku menjadi empat: (1) buku teks pelajaran, (2) buku panduan guru, (3) buku pengayaan dan (4) buku referensi. Menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Buku Teks Pelajaran adalah sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.

Fungsi utama buku adalah sebagai media informasi yang pada awalnya berupa tulisan tangan, kemudian cetakan dan belakangan ini dalam bentuk elektronik. Kehadiran buku teks, baik dalam bentuk cetakan atau elektronik telah memberikan pengaruh besar dalam proses pembelajaran sehingga menimbulkan banyak perubahan. Studi yang dilakukan terhadap 867 SD dan MI di Indonesia (Supriadi, 2001:45), mencatat bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku pelajaran berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajarnya.

Pembelajaran Akuntansi Dengan Buku Teks yang Memasukkan Unsur Pajak

Belajar akuntansi adalah proses yang berkesinambungan dari siklus akuntansi yang diawali dengan analisis bukti transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan keuangan. Pembelajaran tentang proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh subjek akuntansi yang juga subjek pajak atau wajib pajak secara terus menerus akan menimbulkan kebiasaan dan kesadaran akan kewajibannya.

Belajar perpajakan adalah proses belajar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam proses bisnis. Dengan berlakunya peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, subjek akuntansi yang sekaligus menjadi subjek pajak, dalam proses akuntansi wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban mencatat transaksi dengan memasukkan unsur pajak harus dimulai pada tahun buku berjalan.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Cooper & Schindler (Jogiyanto, 2007: 12), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambar atau mendefinisikan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, dimana dan bagaimana melakukannya.

Subjek Uji Coba

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang berjumlah 50 orang.

Analisis Data

Pada studi ini diperoleh data kualitatif tentang pendapat responden mengenai kondisi buku teks saat ini. Data ini diolah dengan mendeskripsikan data yang terdiri dari: pencatatan akuntansi yang ada dalam buku teks yang ada saat ini, pencatatan yang memberi manfaat bagi perusahaan dalam mendukung penyusunan laporan tahunan untuk kepentingan perpajakan, pencatatan yang memudahkan mahasiswa dalam memahami/mempelajari akuntansi keuangan ketika terintegrasi dengan instrumen pajak.

4. HASIL PENELITIAN

Pada tahap ini diperoleh data kualitatif tentang pendapat responden mengenai kondisi buku teks saat ini. Data ini diolah dengan mendeskripsikan data yang terdiri dari: (1) pencatatan akuntansi yang ada di dalam buku teks yang ada saat ini, (2) pencatatan yang memberi manfaat bagi perusahaan dalam mendukung penyusunan laporan tahunan untuk kepentingan perpajakan, (3) pencatatan yang memudahkan mahasiswa dalam memahami/mempelajari akuntansi keuangan ketika terintegrasi dengan instrumen pajak. Berikut deskripsi data masing-masing aspek tersebut.

a. Pencatatan akuntansi yang sudah ada di buku-buku teks saat ini

Pertanyaan untuk mengungkap pencatatan akuntansi yang ada di dalam buku teks yang ada saat ini terdiri dari 10 item dengan jawaban responden untuk aspek ini terinci pada tabel berikut.

Tabel 1: Frekuensi pencatatan akuntansi yang sudah ada di buku-buku teks saat ini

No Item	Pencatatan yang ada di buku teks saat ini (A)	Pencatatan yang belum ada di buku teks saat ini (B)	% (A)	% (B)
1	17	33	34%	66%
5	20	30	40%	60%
9	42	8	84%	16%
13	40	10	80%	20%
17	39	11	78%	22%
21	37	13	74%	26%
29	47	3	94%	6%
33	44	6	88%	12%
37	44	6	88%	12%
41	47	3	94%	6%
Rata-rata			75%	25%

Deskripsi kasus dari masing-masing item terinci sebagai berikut.

Item nomer 1.

Penerimaan yang berasal dari bunga deposito bank akan dicatat sebesar nilai bruto. Selisih penghasilan bruto dikurangi kas yang diterima dicatat sebagai PPh Final.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **34%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Nn. Noni jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki rekening di Bank Sinta yang pada tanggal 29 Februari 2016 memperoleh bunga sebesar Rp500.000; dan **66%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Nn. Noni jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 5.

Pengeluaran untuk membayargaji dicatat sebesar nilai nominal gaji, dikurangi jumlah PPh 21, sedangkan rekening gaji dicatat sebesar nilai nominalnya.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **40%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. Surya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Ps21 yang pada tanggal 30 Mei 2016 membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000; dan **60%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. Surya jika sebagai Wajib Pajak Badan.

Item nomer 9.

Pengeluaran untuk membayarsewa dicatat sebesar nilai sewa dikurangi PPh sewa tanah dan bangunan, sedangkan PPh atas sewa bangunan tersebut merupakan utang penyewa kepada negara.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **84%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Fa. Fajar jika sebagai Wajib Pajak Badan yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang pada tanggal 15 April 2016 membayar sewa ruko sebesar Rp8.000.000 kepada Ny. Susi; dan **16%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Fa. Fajar jika sebagai Wajib Pajak Badan.

Item nomer 13.

Penerimaan dari penjualan surat berharga, PPh atas penjualan saham merupakan PPh Final. Namun dalam transaksi ini PPh Final secara nominatif harus muncul. Hal ini agar subjek akuntansi mempunyai informasi tentang PPh Final yang telah dibayar. Pada saat pembuatan SPT Tahunan akhir tahun, informasi PPh Final sebagai pelengkap dalam pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Rekening PPh Final.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **80%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Basir jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada tanggal 1 Juni 2016 menjual obligasi dengan diskonto 2% dan membayar biaya administrasi Rp200.000; dan **20%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Basir jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 17.

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dan perolehan BKP dan JKP dikenai PPN dengan tarif 10% dari DPP.

Pencatatan yang sudah ada di dalam buku-buku teks akuntansi keuangan saat ini adalah **78%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan UD. Berkah jika bukan sebagai PKP yang pada tanggal 20 Maret 2016 menjual barang dagangan senilai Rp100.000.000 kepada Toko Maju secara kredit dan pencatatan Toko Maju yang tanggal 26 Maret 2016 membayar pelunasan hutangnya; dan **22%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan UD. Berkah dan Toko Maju jika sebagai PKP.

Item nomer 21.

Pencatatan yang sudah ada di dalam buku-buku teks akuntansi keuangan saat ini adalah **74%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan CV. Mekar Jaya jika bukan sebagai PKP yang pada tanggal 5 Januari 2016 membelibarangkenapajak seharga Rp50.000.000 dan pada tanggal 10 Pebruari 2016 hutang atas pembelian barangkenapajak tersebut dilunasi tunai; dan **26%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan CV. Mekar Jaya jika sebagai PKP.

Item nomer 29.

Pembayaran ataupun penerimaan dari persewaan tanah dan/atau bangunan harus dipotong PPh Pasal 4 ayat 2.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **94%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Ny. Ani jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyewakan ruko kepada CV. Segara dengan nilai sewa per tahun Rp10.000.000 dan tanggal 5 Juni 2016 menerima tunai pembayaran sewa untuk 1 tahun; dan **6%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Ny. Ani jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 33.

Pada saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa wajib dipotong PPh Pasal 23.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **88%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Dodot jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyewakan sebuah mobil selama satu bulan kepada CV. Abadi dengan nilai sewa Rp24.000.000 dan pada tanggal 1 Januari 2016 menerima pembayaran tunai atas sewa tersebut; dan **12%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Dodot jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

Item nomer 37.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perolehan BKP dan JKP dikenai PPN dengan tarif 10% dari DPP.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **88%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Sehat jika bukan sebagai PKP yang pada tanggal 10 November 2016 menerima pembayaran uang muka pembelian barang sebesar Rp5.000.000; dan **12%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Sehat jika sebagai PKP.

Item nomer 41.

Pencatatan yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini adalah **94%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Lancar jika bukan sebagai PKP yang pada tanggal 20 September 2016 menerima pengembalian barang dagangan dengan

harga faktur sebelum PPN Rp2.000.000 yang dijual pada tanggal 15 September 2016 secara kredit; dan 6% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Lancar jika sebagai PKP.

Berdasarkan deskripsi tentang “pencatatan akuntansi yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini”, terdapat 8 item dari 10 item pertanyaan dijawab pada kondisi A dengan rata-rata 75%. Ini berarti sebagian besar responden menyatakan bahwa pencatatan kasus-kasus akuntansi seperti yang disajikan dalam kuesioner dilakukan ketika pihak-pihak yang terlibat melakukan pencatatan sebagai *Wajib Pajak Badan yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, atau bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dan atau bukan sebagai PKP.*

b. Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi perusahaan untuk mendukung penyusunan laporan tahunan dan perpajakan

Pertanyaan untuk mengungkap pencatatan akuntansi yang ada di dalam buku teks yang ada saat ini terdiri dari 10 item dengan jawaban responden untuk aspek ini terinci pada tabel berikut.

Tabel 2: Frekuensi pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi perusahaan untuk mendukung penyusunan laporan tahunan dan perpajakan

No Item	Pencatatan yang kurang memberi manfaat (A)	Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat (B)	% (A)	% (B)
2	11	39	22%	78%
6	3	47	6%	94%
10	9	41	18%	82%
14	4	46	8%	92%
18	12	38	24%	76%
22	12	38	24%	76%
26	11	39	22%	78%
30	3	47	6%	94%
34	11	39	22%	78%
38	10	40	20%	80%
42	12	38	24%	76%
Rata-rata			17%	83%

Deskripsi kasus dari masing-masing item terinci sebagai berikut.

Item nomer 2.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat Nn. Noni untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang memiliki rekening di Bank Sinta yang pada tanggal 29 Februari 2016 memperoleh bunga sebesar Rp500.000 adalah 22% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Nn. Noni jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 78% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Nn. Noni jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 6.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi PT. Surya untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 30 Mei 2016 membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000 adalah 6% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. Surya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Ps21; dan 94%

responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. Surya jika sebagai Wajib Pajak Badan.

Item nomer 10.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi Fa. Fajar untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 15 April 2016 membayar sewa ruko sebesar Rp8.000.000 kepada Ny. Susi adalah **18%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Fa. Fajar jika sebagai Wajib Pajak Badan yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan; dan **82%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Fa. Fajar jika sebagai Wajib Pajak Badan.

Item nomer 14.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi Tn. Basir untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 1 Juni 2016 menjual obligasi dengan diskonto 2% dan membayar biaya administrasi Rp200.000 adalah **8%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Basir jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; dan **92%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Basir jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 18.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi perusahaan untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 20 Maret 2016 menjual barang dagangan senilai Rp100.000.000 kepada Toko Maju secara kredit dan Toko Maju tanggal 26 Maret 2016 membayar pelunasan hutangnya adalah **24%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan UD. Berkah dan Toko Maju jika bukan sebagai PKP; dan **76%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan UD. Berkah dan Toko Maju jika sebagai PKP.

Item nomer 22.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi perusahaan untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 5 Januari 2016 membelibarang kenapajak seharga Rp50.000.000 dan pada tanggal 10 Pebruari 2016 hutang atas pembelian barang kenapajak tersebut dilunasi tunai adalah **24%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan CV. Mekar Jaya jika bukan sebagai PKP dan **76%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan CV. Mekar Jaya jika sebagai PKP.

Item nomer 26.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi CV. Krakatau untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 5 Juli 2016 menjual alat tulis kepada Pemda Kota Tua dengan harga faktur sebelum PPN Rp10.000.000 adalah **22%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Krakatau jika bukan sebagai PKP; dan **78%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Krakatau jika sebagai PKP.

Item nomer 30.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi Ny. Ani perusahaan untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang menyewakan ruko kepada CV. Segara dengan nilai sewa per tahun Rp10.000.000 dan tanggal 5 Juni 2016 menerima tunai pembayaran sewa untuk 1 tahun adalah **6%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Ny. Ani jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; dan **94%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Ny. Ani jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 34.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi Tn. Dodot untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang menyewakan sebuah mobil selama satu bulan kepada CV. Abadi dengan nilai sewa Rp24.000.000 dan pada tanggal 1 Januari 2016 menerima pembayaran tunai atas sewa tersebut adalah **22%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Dodot jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi;

78% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Dodot jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 38.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi CV. Sehat untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 10 November 2016 menerima pembayaran uang muka pembelian barang sebesar Rp5.000.000 adalah 20% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Sehat jika bukan sebagai PKP; dan 80% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Sehat jika sebagai PKP.

Item nomer 42.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat bagi UD. Lancar untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 20 September 2016 menerima pengembalian barang dagangan dengan harga faktur sebelum PPN Rp2.000.000 yang dijual pada tanggal 15 September 2016 secara kredit adalah 24% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Lancar jika bukan sebagai PKP; dan 76% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Lancar jika sebagai PKP.

Berdasarkan deskripsi tentang “pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak”, semua item pertanyaan dijawab pada kondisi B dengan rata-rata 83%. Ini berarti sebagian besar responden menyatakan bahwa pencatatan kasus-kasus akuntansi seperti yang disajikan dalam kuesioner dilakukan ketika pihak-pihak yang terlibat melakukan pencatatan sebagai *Wajib Pajak Badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sebagai PKP.*

c. Pencatatan yang lebih mudah dipahami mahasiswa ketika memahami/mempelajari materi akuntansi yang terintegrasi dengan instrumen pajak

Pertanyaan untuk mengungkap pencatatan akuntansi yang ada di dalam buku teks yang ada saat ini terdiri dari 10 item dengan jawaban responden untuk aspek ini terinci pada tabel berikut.

Tabel 3: Frekuensi pencatatan yang lebih mudah dipahami mahasiswa ketika memahami/mempelajari materi akuntansi

No Item	Pencatatan yang lebih sulit dipahami (A)	Pencatatan yang lebih mudah dipahami (B)	% (A)	% (B)
4	10	40	20%	80%
8	15	35	30%	70%
12	13	37	26%	74%
16	14	36	28%	72%
20	13	37	26%	74%
24	9	41	18%	82%
28	14	36	28%	72%
32	13	37	26%	74%
36	19	31	38%	62%
40	12	38	24%	76%
44	13	37	26%	74%
Rata-rata			27%	73%

Deskripsi kasus dari masing-masing item terinci sebagai berikut.

Item nomer 4.

Pada kasus Nn. Noni yang memiliki rekening di Bank Sinta yang pada tanggal 29 Februari 2016 memperoleh bunga sebesar Rp500.000 adalah **20%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Nn. Noni jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; dan **80%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Nn. Noni jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 8.

Pada kasus PT. Surya yang pada tanggal 30 Mei 2016 membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000 adalah **30%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. Surya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Ps21; dan **70%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. Surya jika sebagai Wajib Pajak Badan.

Item nomer 12.

Pada kasus Fa. Fajar yang pada tanggal 15 April 2016 membayar sewa ruko sebesar Rp8.000.000 kepada Ny. Susi adalah **26%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Fa. Fajar jika sebagai Wajib Pajak Badan yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan; dan **74%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Fa. Fajar jika sebagai Wajib Pajak Badan.

Item nomer 16.

Pada kasus Tn. yang pada tanggal 1 Juni 2016 menjual obligasi dengan diskonto 2% dan membayar biaya administrasi Rp200.000 adalah **28%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Basir jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; dan **72%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Basir jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 20.

Pada kasus UD. Berkah yang pada tanggal 20 Maret 2016 menjual barang dagangan senilai Rp100.000.000 kepada Toko Maju secara kredit dan Toko Maju tanggal 26 Maret 2016 membayar pelunasan hutangnya adalah **26%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan UD. Berkah dan Toko Maju jika bukan sebagai PKP; dan **74%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan UD. Berkah dan Toko Maju jika sebagai PKP.

Item nomer 24.

Pada kasus CV. Mekar Jaya yang pada tanggal 5 Januari 2016 membelibarang kenapajak seharga Rp50.000.000 dan pada tanggal 10 Pebruari 2016 hutang atas pembelian barang kenapajak tersebut dilunasi tunai adalah **18%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan CV. Mekar Jaya jika bukan sebagai PKP; dan **82%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan CV. Mekar Jaya jika sebagai PKP.

Item nomer 28.

Pada kasus CV. Krakatau yang pada tanggal 5 Juli 2016 menjual alat tulis kepada Pemda Kota Tua dengan harga faktur sebelum PPN Rp10.000.000 adalah **28%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Krakatau jika bukan sebagai PKP; dan **72%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Krakatau jika sebagai PKP.

Item nomer 32.

Pada kasus Ny. Ani perusahaan yang menyewakan ruko kepada CV. Segara dengan nilai sewa per tahun Rp10.000.000 dan tanggal 5 Juni 2016 menerima tunai pembayaran sewa untuk 1 tahun adalah **26%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Ny. Ani jika **bukan** sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; **74%** responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Ny. Ani jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 36.

Pada kasus Tn. yang menyewakan sebuah mobil selama satu bulan kepada CV. Abadi dengan nilai sewa Rp24.000.000 dan pada tanggal 1 Januari 2016 menerima pembayaran tunai atas sewa tersebut adalah **38%** responden menjawab pencatatan seperti yang

dilakukan oleh Tn. Dodot jika bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 62% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh Tn. Dodot jika sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item nomer 40.

Pada kasus CV. Sehat yang pada tanggal 10 November 2016 menerima pembayaran uang muka pembelian barang sebesar Rp5.000.000 adalah 24% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Sehat jika bukan sebagai PKP; dan 76% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh CV. Sehat jika sebagai PKP.

Item nomer 44.

Pada kasus UD. Lancar untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak yang pada tanggal 20 September 2016 menerima pengembalian barang dagangan dengan harga faktur sebelum PPN Rp2.000.000 yang dijual pada tanggal 15 September 2016 secara kredit adalah 26% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Lancar jika bukan sebagai PKP; dan 74% responden menjawab pencatatan seperti yang dilakukan oleh UD. Lancar jika sebagai PKP.

Berdasarkan deskripsi tentang “pencatatan yang lebih mudah dipahami mahasiswa ketika mempelajari materi akuntansi yang terintegrasi dengan instrumen pajak”, semua item pertanyaan dijawab pada kondisi B dengan rata-rata 73%. Ini berarti sebagian besar responden menyatakan bahwa pencatatan kasus-kasus akuntansi seperti yang disajikan dalam kuesioner dilakukan ketika pihak-pihak yang terlibat melakukan pencatatan sebagai *Wajib Pajak Badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sebagai PKP.*

2. Pembahasan

Persaingan sumberdaya manusia pada era perdagangan bebas saat ini semakin ketat. Salah satu yang dapat diamati adalah sumberdaya manusia yang bidang pekerjaannya terkait dengan proses akuntansi. Perusahaan cenderung telah menerapkan proses akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak.

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Tahap pencatatan transaksi dimulai dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan jurnal transaksi dan buku besar pembantu, dan posting buku besar. Tahap pengikhtisaran dimulai dari pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian dan neraca lajur, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup dan jurnal balik. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, maka diperlukan buku teks akuntansi yang memasukkan unsur pajak. Buku semacam ini akan membantu para calon-calon sumberdaya manusia terutama para mahasiswa dalam memahami proses akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih komprehensif. Mahasiswa sejak di bangku kuliah sudah mulai mempelajari buku akuntansi yang sudah memasukkan unsur pajak, sehingga mendukung pencapaian kompetensi lulusan sebagai tenaga ahli dalam bidangnya sesuai Perpres No 8 Tahun 2012 Pasal 2. Dengan demikian para lulusan akan siap bekerja dapat menerapkan di perusahaan dengan lebih mudah.

Pada kenyataan terdapat beberapa buku teks akuntansi tersedia yang saat ini, belum ada buku teks akuntansi yang memasukkan unsur pajak di dalamnya. Buku-buku teks akuntansi berisi materi yang menjelaskan proses akuntansi mulai dari pembuatan bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan berbagai penerapan prinsip akuntansi lainnya. Dalam buku-buku teks tersebut belum dimasukkan unsur pajak ketika membahas penyusunan laporan keuangan secara parsial maupun secara komprehensif. Meskipun berbagai aturan perpajakan sudah diterbitkan oleh Dirjen Pajak ataupun Menteri Keuangan, namun laporan keuangan yang disusun belum disesuaikan dengan aturan tersebut. Buku teks akuntansi yang

belum memasukkan unsur pajak tersebut akan berdampak pada pola pikir dan kebiasaan para mahasiswa yang tidak langsung mengkaitkan unsur pajak ketika menyusun laporan keuangan. Tentu akan sangat berbeda bila para mahasiswa menggunakan buku teks yang sudah memasukkan unsur pajak dengan berbagai aturannya. Pola pikir mahasiswa tentunya akan berubah ketika berpikir akuntansi mereka sekaligus akan berpikir dengan mengaitkan unsur pajak di dalamnya. Untuk mengubah pola pikir mahasiswa agar ketika belajar akuntansi selalu berorientasi pada perpajakan, perlu ada buku teks akuntansi yang memasukkan unsur pajak dalam proses penyusunan laporan keuangannya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan dukungan data untuk menjawab permasalahan tingkat kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep akuntansi dan pajak dengan menggunakan buku teks akuntansi yang tidak terintegrasi dengan instrumen pajak maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pencatatan akuntansi yang sudah ada di buku-buku teks akuntansi saat ini ada pada kondisi dimana pencatatan kasus-kasus akuntansi seperti yang disajikan dalam kuesioner dilakukan ketika pihak-pihak yang terlibat melakukan pencatatan sebagai *Wajib Pajak Badan yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, atau bukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dan atau bukan sebagai PKP* dengan rata-rata skor 75%.

Pencatatan yang lebih banyak memberi manfaat untuk penyusunan laporan tahunan dan pajak ada pada kondisi dimana pencatatan kasus-kasus akuntansi seperti yang disajikan dalam kuesioner dilakukan ketika pihak-pihak yang terlibat melakukan pencatatan sebagai *Wajib Pajak Badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sebagai PKP* dengan rata-rata skor 83%, dan pencatatan yang lebih mudah dipahami mahasiswa ketika mempelajari materi akuntansi yang terintegrasi dengan instrumen pajak dengan rata-rata skor 73%.

6. REFERENSI

- Abut, H., *Perpajakan Indonesia*, Cetakan ke-1, Diadit Media, 2010.
- Giri, E.F., *Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perspektif IFRS*, UPP STIM YKPN, 2012.
- Horngren & Harrison, *Akuntansi*, Edisi 7, Penerbit Erlangga, 2007.
- Jogiyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE, 2007.
- Jusuf, Al.H., *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi 7. BP STIE YKPN, 2011.
- Kieso, D. E., Weygandt, J.J., & Walfield, T.D., *Akuntansi Intermediate*. Edisi 10, Erlangga, 2002
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Ed. XVII, Penerbit Andi. 2013.
- Sadeli, H.L.M. *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi 1, Cetakan ke 8, Penerbit Bumi Aksara, 2014.
- Sitepu, B.P., *Penulian Buku Teks Pelajaran*, PT. Remaja Rosda Karya, 2012,
- Supriadi, D., *Anatomi Buku Sekolah di Indonesia*, Adi Cita, 2001.
- Suprijono, A., *Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM*, Cetakan ke XI,, Pustaka Pelajar, 2013.

Suwardjono, *Akuntansi Pengantar*, Cetakan II, BPFE, 2003.

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia
Undang-Undang Perpajakan No 28 tahun 2007